

## FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT TERHADAP PENINGKATAN AKSES PERMODALAN DI PROPINSI JAWA TIMUR

Ike Kusdyah Rachmawati

STIE Asia Malang  
Jl. Soekarno Hatta - Rembuksari No.1A Malang, 65141

### *Abstract*

*This study aimed to analyze the critical success factors program people's business credit against increasing capital access in East Java. It used qualitative and quantitative approaches and it used descriptive analysis that analyzed the contribution program assistance to micro and small groups and various internal and external constraints, and used Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the priority level of the factors that affected the Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sample of this study was the banking, micro business, small business, business and service / technical institutions in East Java. The research was done in the 3 (three) districts which were Sidoarjo regency, Malang and Surabaya. Based on the results of the AHP, access to services and KUR performance could be improved by considering some factors and sub factors that influenced it, among others: candidate's prospects debtor, office of technical capacity, policy and resources banking, and macro factors. Macro factors were factors that should always be monitored. The responsible party for this macro was a BI factor as the banking authorities.*

**Key words:** *financial inclusion, credit, small management enterprise (SMEs).*

Usaha mikro dan kecil merupakan wujud nyata dari *self employed* yang dilakukan masyarakat lapis bawah dalam rangka bertahan hidup. Melalui usaha-usaha produktif tersebut, mereka percaya dapat dan mampu untuk mengangkat masyarakat dirinya dari lembah kemiskinan. Keteguhan dan ketangguhan usaha mikro dalam menjaga keberlangsungan usaha beriringan dengan menjaga keberlangsungan hidup mereka. Keberadaan usaha mikro dan kecil dalam struktur ekonomi Indonesia, nampak jelas bahwa 51,2 juta unit usaha yang terdampar di belahan Indonesia, (99,97 %) adalah usaha ekonomi yang melibatkan rakyat dalam

jumlah besar, atau dalam bahasa pemerintah biasa dinamakan "usaha mikro", "usaha kecil" dan "usaha menengah". Kontribusinya yang signifikan dalam perekonomian nasional, maka penting upaya pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan menengah dari berbagai pihak, baik pemerintah, kalangan perbankan maupun lembaga-lembaga internasional.

Namun di balik berbagai potensi ekonomi yang melekat pada usaha mikro dan kecil, terdapat kendala yang dialami oleh usaha mikro dan kecil, seperti kebanyakan usaha mikro lainnya, kurang dikelola secara profesional. Beberapa kendala yang

---

Korespondensi dengan Penulis:

**Ike Kusdyah Rachmawati:** Telp./Fax. +62 341 478 877

E-mail: [kusdyah\\_ike@yahoo.com](mailto:kusdyah_ike@yahoo.com)

menyulitkan sektor usaha mikro dan kecil dapat berkembang lebih cepat, diantaranya adalah: kesulitan usaha mikro dan kecil menembus pasar (*limited access to market*), kelemahan kemampuan pengembangan dan penguatan usaha (*low level of capability*), dan kesulitan UMKM mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal (*limited access to financial sector*). Usaha mikro dan kecil yang sebagian besar bergerak di sektor informal memiliki akses yang lemah terhadap kredit perbankan. Salah satu penyebabnya diduga adalah alasan persyaratan administrasi perbankan, terutama persoalan *collateral* atau jaminan yang tidak dapat dipenuhi oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Berbagai kendala tersebut, tentulah menjadi perhatian yang serius dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Pemerintah sangat menyadari bahwa usaha mikro dan kecil dapat membantu dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tentunya diperlukan langkah-langkah strategis, salah satu diantaranya melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sehingga elemen penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan melalui perbaikan akses terhadap pendanaan usaha mikro dan kecil. Penyediaan akses terhadap pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari keikutsertaan sektor perbankan. Karena ketiadaan akses terhadap pembiayaan yang memadai layaknya tembok menghalangi seseorang untuk keluar dari kemiskinan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007. Melalui program KUR diharapkan dapat menjadi solusi bagi keterbatasan usaha mikro dan kecil yang secara ekonomi *feasible* namun belum *bankable* dalam mengembangkan kapasitas usaha sehingga mampu menjadi bagian efektif dalam program penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, melalui program KUR, pemerintah mengharapkan adanya akselerasi/percepatan pengembangan kegiatan perekonomian terutama di sektor riil, dalam rangka penang-

gulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hal yang menarik adalah bagaimana menganalisis faktor penentu keberhasilan program kredit usaha rakyat terhadap peningkatan akses permoldan bagi usaha mikro dan kecil di Propinsi Jawa Timur.

Beberapa penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya memberikan hasil yang beragam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Retnadi (2008) menunjukkan bahwa kendala dalam penyaluran KUR, antara lain: (1) belum adanya pemahaman yang seragam terhadap skim KUR, baik oleh para petugas bank di lapangan maupun masyarakat, sehingga mungkin saja masih ada beberapa penyimpangan dan persepsi yang keliru tentang KUR, misalnya: tentang ketentuan agunan, persyaratan administrasi, sumber dana KUR, beroperasinya para calo KUR mikro. (2) Pemenuhan tenaga pemasaran KUR tidak bisa dilakukan seketika oleh perbankan namun harus dilakukan secara bertahap. Hal ini terjadi karena pemberian KUR harus dilaksanakan sesuai prinsip kehati-hatian dalam perbankan sehingga diperlukan kompetensi tenaga kerja yang sesuai. (3) Adanya perubahan kondisi makro-ekonomi, misalnya: kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, dan lain-lain yang menyebabkan permintaan kredit menurun.

Setyobudi (2007) mengemukakan peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM mengalami perubahan paradigma, namun bukan berarti kebijakan dan strategi untuk mendukung UMKM menjadi berkurang tetapi disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan Bank Indonesia melalui kebijakan yang bersifat *demand side* maupun *supply side* bertujuan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya akses UMKM kepada perbankan melalui mekanisme hubungan bisnis yang saling menguntungkan sehingga dapat berkesinambungan.

Zhao, *et al.* (2006) menyatakan bahwa selain aspek modal atau jaminan sebagai salah satu faktor yang menentukan, faktor lain seperti skala usaha,

kesepakatan perjanjian bank, hubungan baik dengan pihak bank. Faktor lain dari finansial, *asset debt ratio*, *net profit* dan pendapatan serta skor kredit bukan faktor yang menentukan dalam mendapatkan pinjaman bank. Dari beberapa faktor, justru aspek skala usaha yang berperan signifikan pada SMEs di Chendu City Capital of Southwestern China's Sichuan Province

Penelitian lain yang dilakukan oleh Syarif (2011) KUR merupakan model perkreditan yang inovatif yang sangat bermanfaat bagi UMKM untuk mendukung peningkatan produksi dan pendapatan UMKM, oleh sebab itu program KUR harus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah dan kalangan *stakeholder* lainnya dengan mengatasi semua masalah yang menjadi kendala dalam pengembangan program tersebut.

Menurut Muna (1988) bahwa prosedur pemberian pinjaman merupakan kendala bagi kelompok miskin khususnya di pedesaan untuk berhubungan dengan lembaga perkreditan normal yang menerapkan sistem administrasi keuangan modern, yang masih sulit dimengerti oleh mereka yang berpendidikan rendah. Faktor ini berpengaruh nyata positif karena prosedur pemberian pinjaman adalah berkaitan langsung dengan efisiensi dalam penggunaan waktu, tenaga dan dana dalam pengajuan kredit.

Lebih lanjut Soemardjan (1988) mengemukakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat kelas gurem sebenarnya tidak diperlukan tindakan preventif yang berlebihan dari lembaga perkreditan karena mereka selalu mengingat dengan baik jumlah hutang-hutang mereka selain itu menjelaskan prosedur pemberian kredit dari lembaga keuangan formal dapat menyebabkan meningkatnya biaya pinjaman yang harus ditanggung oleh para peminjam.

Fatoki & Smit (2011) menyatakan terdapat 9 faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran kredit pada usaha kecil menengah (SMEs) di South Africa. Secara internal, antara lain: kompetisi

manajerial, permodalan, jaringan dan terbatasnya informasi bisnis, sedangkan secara eksternal dibedakan atas: lingkungan, legalitas, persepsi etika, kejahatan dan korupsi.

Bowen, *et al.* (2009) menambahkan bahwa tantangan dan kendala pengembangan SMEs di Nairobi Kenya, antara lain: kompetisi dengan usaha besar, kendala kredit, rendahnya impor dan ketidaknyamanan serta pengumpulan utang. Yang berperan dominan dalam penelitian ini menurut Bowen, *et al.* (2009) adalah kendala perkreditan. Penelitian ini menawarkan strategi yang mungkin dapat menjadi solusi dalam pengembangan SMEs di Nairobi Kenya adalah sebagai berikut: keadilan harga, pemberian diskon, penawaran khusus, tersedia produk yang bervariasi, pelayanan dan layanan berkelanjutan. Hal ini bisa berhasil kalau mengkombinasikan dari beberapa strategi tersebut.

Dari tulisan dan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya sudah ada yang membahas tentang bagaimana menyalurkan KUR dengan baik dan tepat sasaran, kendala dalam penyaluran KUR, peran bank dalam penyaluran KUR, aspek modal sebagai penentu keberhasilan, model kredit yang inovatif, dan prosedur pemberian kredit namun dari penelitian yang ada belum ditemukan pembahasan keberhasilan program KUR dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), dimana mengulas secara mendalam aspek internal dan eksternal dalam penyaluran KUR dan untuk melihat elemen apa yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan kinerja program KUR.

Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penyaluran program KUR di Propinsi Jawa Timur, untuk menganalisis berbagai faktor eksternal maupun faktor internal dalam pengelolaan program KUR, serta kecenderungan keberhasilan program KUR di Propinsi Jawa Timur, dan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur.

**METODE**

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan memakai analisis deskriptif yang menganalisis kontribusi program bantuan kepada kelompok usaha mikro dan kecil dan berbagai kendala internal dan eksternalnya, serta memakai *Analytic Hierarchy Process (AHP)* untuk mengetahui tingkat prioritas faktor-faktor yang memengaruhi dalam penyaluran KUR. Sampel penelitian ini adalah perbankan, pelaku usaha mikro, pelaku usaha kecil, usaha dan dinas/instansi teknis di propinsi Jawa Timur. Adapun lokasi penelitian di lakukan di 3 (tiga) kabupaten/kota yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang dan Kota Surabaya. Untuk memperoleh data dan informasi yang baik dan terukur dalam kajian ini, maka untuk mengali informasi di lapangan menggunakan metode survei. Di samping itu untuk mendapatkan persepsi bank pelaksana, maka pengambilan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Penelitian ini juga mengumpulkan persepsi pelaku usaha, pelaksana program, baik di tingkat propinsi dan kabupaten/kota terutama menyangkut pelaksanaan program KUR. Pendekatan kualitatif dilakukan dalam melihat kerangka kebijakan dan implementasi program KUR. Selain

itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat kinerja pelaksanaan program KUR dan perkembangannya.

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Adapun beberapa metode analisis yang digunakan dalam kajian ini, antara lain: analisis deskriptif merupakan analisis statistik untuk memberi gambaran umum sesuatu yang dibahas. Analisis deskriptif dapat dijelaskan melalui angka-angka statistik maupun menggunakan gambar/grafik dan tabel. Analisis deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang merupakan analisis sederhana tetapi cukup kuat untuk menggambarkan hubungan antar peubah dan AHP yang digunakan untuk mengetahui tingkat prioritas faktor-faktor yang memengaruhi dalam penyaluran KUR. Menurut Saaty (1975), AHP merupakan teori pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio dari perbandingan pasangan yang diskret maupun kontinyu. Pengukurannya bisa secara aktual atau dari suatu skala dasar yang mencerminkan perasaan dan preferensi.

Untuk mendapatkan kejelasan variabel dan penentuan data yang diperlukan, maka variabel-variabel tersebut perlu dioperasionalisasikan. Secara sistematis operasonalisasi variabel-variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Operasonalisasi dan Pengukuran Variabel

Dimensi	Konsep	Indikator
Dimensi Akses Permodalan	Berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas usaha mikro dan kecil terhadap permodalan usaha melalui lembaga perbankan.	Peraturan Pemerintah, UU Perbankan, Plafon Kredit, Realisasi Kredit, Nasabah, Sektor Ekonomi.
Faktor Internal dan Eksternal	Identifikasi faktor yang mengatur mekanisme pengelolaan dan penyaluran kredit perbankan.	Administrasi kredit, jaminan dan proposal, jumlah sumber daya manusia pelaksana kredit, evaluasi dan monitoring kredit.
Faktor Penentu Kredit Usaha Rakyat	Identifikasi berbagai faktor yang dapat menentukan keberhasilan penyaluran kredit.	(1) Calon debitur yang dicerminkan oleh informasi KUR, kelayakan usaha, dan agunan, (2) Kebijakan dan sumberdaya perbankan yang dicerminkan oleh jaringan, <i>account officer</i> dan risiko kredit, (3) Kapasitas dinas teknis yang dicerminkan oleh sosialisasi dan koordinasi, pendampingan usaha dan, (4) Lingkungan makro yang dicerminkan oleh kebijakan perbankan dan kenaikan suku bunga

## HASIL

Berdasarkan Adendum II (*Memorandum of Understanding/MoU*) Departemen Teknis, perbankan, lembaga penjamin yang ditanda tangani tanggal 12 Januari 2010, terdapat peningkatan jumlah bank pelaksana yang semula 6 bank umum menjadi 19 bank yang terdiri dari 6 bank umum dan 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Adapun Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berpartisipasi antara lain: Bank DKI, BPD Jabar dan Banten, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sumatera Barat, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimantan Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Utara, BPD Maluku dan BPD Papua.

Untuk mengetahui jumlah penyebaran jaringan dan sekaligus indikator penyaluran kredit kantor cabang bank pelaksana KUR di Propinsi Jawa Timur. Tabel 2 merupakan ringkasan indikator dalam penyaluran kredit di Propinsi Jawa Timur.

**Tabel 2.** Ringkasan Indikator Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Jawa Timur

Indikator	Jumlah (dlm jutaan)
Plafon KUR (d/m Rp. Jutaan)	4.909.022
Outstanding KUR (d/m Rp. Jutaan)	2.288.493
Debitur (orang)	656.127
Persentase KUR Dari Nasional *)	14,12 %
Persentase Debitur dari Nasional *)	17,21 %

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur (diolah)

Keterangan: \*) *Outstanding* dan Debitur KUR per 31 Desember 2010.

Data realisasi KUR di Propinsi Jawa Timur sampai dengan akhir 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp4.909.022 miliar untuk jumlah debitur sebesar 656.127 nasabah. Sementara itu Propinsi Jawa Timur berhasil merealisasikan KUR terbanyak dengan proporsi masing-masing sebesar 14,12% atau Rp.2.288.493 juta. Tingginya angka penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur disebabkan oleh faktor sosialisasi dan koordinasi yang baik, sehing-

ga masyarakat banyak mendapat informasi yang jelas tentang program KUR. Pada sisi lain bisa juga disebabkan jumlahnya dan penyebaran jumlah kantor cabang bank pelaksana KUR pada daerah di pulau Jawa.

Tabel 3 berikut ini merupakan data penyaluran kredit usaha rakyat pada beberapa bank yang beroperasi di Jawa Timur.

**Tabel 3.** Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada Bank Pelaksana di Jawa Timur

Bank Pelaksana	Jumlah (d/m jutaan)
Bank Mandiri	110.394
BTN	51.857
Bank Rakyat Indonesia (KUR Ritel)	362.819
Bank Rakyat Indonesia (KUR Mikro)	739.059
BNI	175.870
Bank Bukopin	54.564
Bank Syariah Mandiri	30.253
Bank Jatim	763.676
Total	2.288.492

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Timur (diolah)

Selanjutnya faktor-faktor internal dalam proses penyaluran KUR bagi bank pelaksana dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Faktor-Faktor Internal dalam Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat bagi Bank Pelaksana KUR

Indikator Faktor-Faktor Internal	Prioritas
Keterbatasan Sumberdaya Account Officer (AO) yang menangani Kredit Usaha Rakyat	I
Media/leaflet/brosur tentang program Kredit Usaha Rakyat.	II
Jangkauan pelayanan Bank Pelaksana KUR.	III
Pemahaman tentang program KUR di tingkat pelaksana (AO) di masing-masing Bank Pelaksana	IV

Di samping faktor internal bank pelaksana juga memperhatikan faktor-faktor eksternal yang juga memengaruhi proses penyaluran KUR. Temuan lapangan beberapa faktor eksternal yang

banyak ditemui oleh bank pelaksana KUR antara lain adalah adanya persepsi yang kurang tepat tentang KUR, misalnya yang berkaitan dengan ketentuan agunan, persyaratan administrasi dan sumber dana KUR, serta program kredit lain dari pemerintah yang menggunakan subsidi bunga. Dalam hal proses pelaksanaan penyaluran KUR, bank pelaksana menggunakan analisis kredit sebagai alat untuk mengambil keputusan.

**Tabel 5.** Faktor-Faktor Eksternal dalam Proses Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Bank Pelaksana KUR

Indikator Faktor-Faktor Eksternal	Prioritas
Persepsi atau pemahaman tentang program KUR (di tingkat dinas teknis dan pelaku usaha)	I
Kondisi makro ekonomi	II
Program kredit pemerintah terkait usaha mikro dan kecil dengan subsidi bunga, selain KUR	II
Koordinasi Dinas Terkait	IV

Untuk menentukan skala prioritas penentuan keberhasilan KUR dilakukan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk melihat elemen apa yang paling dominan dalam menentukan keberhasilan kinerja program KUR. Proses AHP dilakukan dengan para pakar yang selama ini mendalami per-

masalahannya pelaksanaan KUR. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa faktor-faktor penentu akses layanan KUR adalah prospek calon debitur, kapasitas dinas teknis, kebijakan dan sumberdaya perbankan, dan lingkungan makro dari keempat faktor tersebut berdasarkan perhitungan bobot dengan menggunakan AHP prospek calon debitur merupakan skala prioritas pertama yang harus diperhatikan, sedangkan faktor lainnya diurutkan berdasarkan nilai bobot yang ada. Berdasarkan hasil AHP tersebut, akses layanan dan kinerja KUR dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor dan sub faktor yang memengaruhinya, antara lain: (1) Prospek calon debitur; (2) Kapasitas dinas teknis; (3) Kebijakan dan sumberdaya perbankan; (4) Faktor makro: faktor makro merupakan faktor yang harus selalu dimonitor, pihak yang bertanggung jawab terhadap faktor makro ini adalah BI sebagai otoritas perbankan. BI dapat berkoordinasi dengan bank pelaksana untuk *sharing* informasi terhadap hal-hal yang terkait dengan faktor makro yang tidak dapat diprediksi.

## PEMBAHASAN

Program KUR merupakan model pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan pendekatan *fi-*

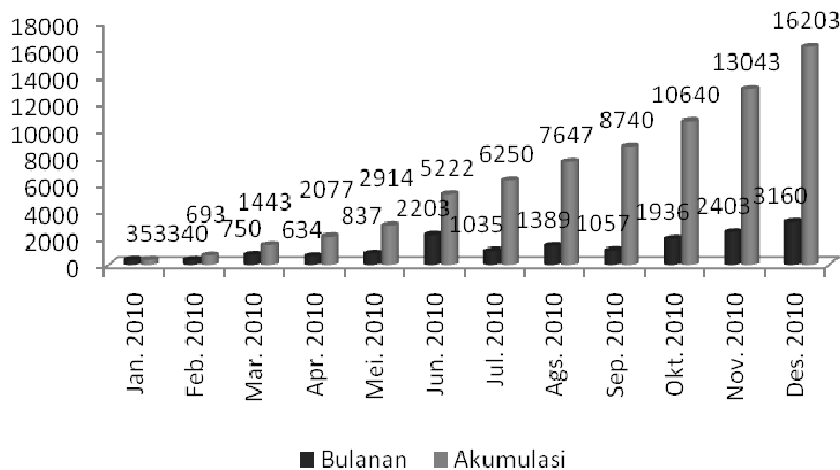
**Tabel 6.** Skala Prioritas Faktor dan Sub Faktor Penentu Keberhasilan KUR

Klasifikasi	Faktor dan Sub faktor	Bobot	Skala Penentu
Faktor	Calon Debitur	0.5398	1
Sub Faktor	Agunan	0.3091	1
Sub Faktor	Informasi KUR	0.2507	2
Sub Faktor	Kelayakan Usaha	0.1854	3
Faktor	Kapasitas Dinas Teknis	0.1979	2
Sub Faktor	Pendampingan Usaha	0.6379	1
Sub Faktor	Sosialisasi dan Koordinasi	0.1564	2
Faktor	Kebijakan dan Sumberdaya Perbankan	0.1715	3
Sub Faktor	Agunan	0.3587	1
Sub Faktor	Risiko Kredit	0.2358	2
Sub Faktor	Jaringan	0.0634	3
Sub Faktor	Account Officer	0.0449	4
Faktor	Lingkungan Makro	0.0908	4
Sub Faktor	Kebijakan Perbankan	0.2344	1
Sub Faktor	Kenaikan Suku Bunga	0.2149	2

*nancial inclusion* yang secara khusus diperuntukkan bagi usaha mikro dan kecil. Melalui pembiayaan dengan pendekatan *financial inclusion* diharapkan semakin membuka akses bagi usaha mikro dan kecil berinteraksi dengan lembaga perbankan dalam rangka mendapatkan pinjaman permodalan usaha. Program KUR bersumber dari dana perbankan, disediakan untuk keperluan modal kerja dan investasi; dan disalurkan kepada pelaku UMK perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha *feasible* tetapi belum *bankable*. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan UMKM melalui penerapan skim penjaminan kredit. Penjaminan KUR tersebut diberikan oleh perusahaan penjaminan yang melakukan kegiatan dalam bentuk penjaminan kredit atau pembiayaan untuk membantu usaha mikro dan kecil guna memperoleh kredit atau pembiayaan dari bank pelaksana.

Penyaluran KUR terus dipantau dengan seksama oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMK selaku *leading sector* dari program tersebut. Adapun perkembangan penyaluran kredit dan debitur KUR sampai dengan 31 Desember 2010 dapat dilihat pada Gambar 1.

Secara nasional, penyaluran KUR yang dilakukan oleh 19 (sembilan belas) bank pelaksana KUR sampai dengan 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp16.203 miliar untuk 3.812.598 nasabah. Secara sektoral terdapat 2 (dua) sektor ekonomi yang menyerap program KUR terbesar yaitu sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) dengan porsi mencapai 63,7 % atau Rp 9.995 miliar dan sektor pertanian dengan porsi 17,1 % atau Rp2.993 miliar dari total KUR yang disalurkan. Data realisasi KUR secara nasional hingga 31 Desember 2010 mencapai Rp16.203 miliar untuk 3.812.598 nasabah yang tersebar di 33 provinsi dengan rata-rata kredit sebesar Rp9 juta per debitur. Penyaluran KUR 31 Desember 2010 untuk bank umum sebesar Rp 14.190,94 miliar untuk 3.786.366 orang dengan rata-rata kredit sebesar 8,5 juta per nasabah. Dengan bank umum terbesar melakukan penyaluran KUR yakni Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp.8.969,05 miliar (55,4 % dari penyaluran KUR Nasional) untuk 3.666.113 nasabah. Penyaluran KUR 31 Desember 2010 untuk bank BPD sebesar Rp.2.012,34 miliar untuk 26.232 orang dengan rata-rata kredit sebesar 84,3 juta per nasabah. Untuk bank BPD terbesar melakukan penyaluran KUR yakni BPD Jatim sebesar Rp780,29 miliar (4,8% dari penyaluran KUR Nasional) untuk 7.058 nasabah.



Gambar 1. Perkembangan Penyaluran Kredit dan Debitur KUR sampai dengan 31 Desember 2010

Beberapa indikator yang ditemukan dalam penelitian ini dalam data realisasi penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur sampai dengan akhir 31 Desember 2010, disebabkan oleh faktor sosialisasi dan koordinasi, sehingga masyarakat banyak mendapat informasi yang jelas tentang program KUR, sedangkan jumlah penyebaran jaringan kantor cabang bank pelaksana KUR di Propinsi Jawa Timur makin bertambah.

Telaah empiris dikatakan oleh Fatoki & Smit (2011) bahwa informasi bisnis menjadi aspek internal yang sangat penting dalam program ini. Dalam penelitian ini masyarakat Jawa Timur mendapat kemudahan dalam memperoleh informasi yang jelas dari dinas-dinas terkait sehingga memungkinkan perluasan penyaluran oleh bank pelaksana dengan mudah.

Terbatasnya tenaga *account officer* (AO) yang menangani KUR, keterbatasan media promosi, jangkauan pelayanan dan pemahaman AO tentang KUR pada tingkat bank pelaksana, merupakan kendala internal dalam penyebaran penyaluran KUR ke sektor lain. Beberapa kendala internal pada bank pelaksana tersebut mengingat program KUR relatif baru, serta adanya unsur pembelajaran bagi petugas terkait dengan sistem dan prosedur kredit mikro yang sederhana dan menuntut pemantauan yang ketat. Sistem dan prosedur serta aturan main yang berbeda pada umumnya diterapkan dalam standar perbankan formal, sehingga pengelolaan bisnis tidak bisa disampaikan dengan aturan main standar perbankan formal, tetapi menuntut paradigma baru yang tentunya lebih menggunakan pendekatan informal dalam proses pengelolaan kredit ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdurrahman (2010) dimana dikatakan bahwa penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah harus mempertimbangkan pendekatan persepsi umum yang berlaku dalam *local content* budaya setempat tempat bank penyalur berada. Pendekatan partisipasi dan *multistakeholder* menjadi hal yang patut diperhatikan dalam hal ini. Yang oleh Abdurrahman (2010) akhirnya dikatakan sebagai pendekatan

perspektif sosiologi. Temuan empiris lainnya oleh Fatoki & Smit (2011) yang mengatakan bahwa, kendala kemampuan petugas yaitu kompetisi manajerial menjadi bagian penting yang patut diperhatikan sebagai aspek internal dari bank pelaksana penyaluran kredit KUR ini.

Di samping faktor internal bank pelaksana juga memperhatikan faktor-faktor eksternal yang juga memengaruhi proses penyaluran KUR. Temuan lapangan, antara lain adalah adanya persepsi yang kurang tepat tentang KUR, misalnya yang berkaitan dengan ketentuan agunan, persyaratan administrasi dan sumber dana KUR, serta program kredit lain dari pemerintah yang menggunakan subsidi bunga. Dalam hal proses pelaksanaan penyaluran KUR, bank pelaksana menggunakan analisis kredit sebagai alat untuk mengambil keputusan. Maka pertimbangan lain yang menjadi prioritas antara lain: kemantapan *cashflow* usaha (kemampuan mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktunya), potensi usaha yang dibiayai (perdagangan, restorasi, jasa, pertanian, dan lain-lain), kemampuan usaha memajukan produksi dan menyerap tenaga kerja, memiliki catatan/laporan usaha yang memadai, serta kemampuan menyeretkan jaminan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Suryahadi, dkk. (2010) dimana dikatakan bahwa program kebijakan pemerintah terkait dengan bank pelaksana penyalur kredit harus membagi kelompok-kelompok penerima kredit menjadi 3 kluster, yaitu: (1) *social assistance*; (2) *community empowerment*; dan (3) *micro enterprise empowerment* yang ketiganya ingin mengeliminir adanya kendala terbatasnya penyediaan modal.

Sejalan dengan Suryahadi, dkk. (2010) dikatakan pula oleh Zhao, *et al.* (2006) tidak hanya aspek penyediaan modal atau jaminan. Tapi juga skala usaha, kesepakatan perjanjian dengan bank pelaksana serta memiliki komunikasi atau hubungan baik dengan pihak terkait, menjadi alasan yang penting dalam program ini.



Berdasarkan hasil AHP tersebut, akses layanan dan kinerja KUR dapat ditingkatkan dengan memperhatikan beberapa faktor dan sub faktor yang memengaruhinya, antara lain: (1) Prospek calon debitur: prospek calon debitur dapat dianggap sebagai *customer* dari KUR, eksisting kondisi pelaku usaha mikro dan kecil masih belum dapat mengakses modal karena dianggap tidak *bankable*, lembaga penggagas KUR dapat bertindak sebagai lembaga yang menyediakan basis data pelaku usaha mikro dan kecil dan melakukan pembinaan kepada UMKM untuk meningkatkan kinerja UMKM agar memiliki kriteria standar dalam mengakses modal. Untuk itu 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu: jaminan, kelayakan usaha dan administrasi yang perlu disosialisasikan kepada UMKM; (2) Kapasitas dinas teknis: dinas teknis selaku pembina diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai potensi pelaku usaha mikro dan kecil dan sekaligus memahami permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha. Dengan demikian dinas teknis mempunyai basis data pelaku usaha mikro yang prospektif untuk mengajukan permodalan melalui program KUR. Di samping itu dinas teknis juga dapat membantu penguatan kelembagaan pelaku usaha mikro dan kecil; (3) Kebijakan dan sumberdaya perbankan: pihak perbankan sebagai penyedia dana dan eksekutor KUR perlu meningkatkan *performance* bank itu sendiri baik persepsi bank, ketersediaan jaringan, dan ketersediaan AO (dalam terminologi Bank BRI tebih dikenal dengan Mantri KUR) untuk melayani perluasan akses terhadap KUR. Pihak perbankan dapat melakukan kerjasama dengan dinas teknis di masing-masing daerah sebagai penyedia basis data pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui basis data pelaku usaha mikro dan kecil yang potensial dapat meningkatkan penyerapan KUR agar tidak bermasalah dalam pelunasan KUR oleh UMKM; (4) Faktor Makro: faktor makro merupakan faktor yang harus selalu dimonitor, pihak yang bertanggung jawab terhadap faktor makro ini adalah BI sebagai otoritas perbankan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penyaluran program KUR di Propinsi Jawa Timur, untuk menganalisis berbagai faktor eksternal maupun faktor internal dalam pengelolaan program KUR, serta kecenderungan keberhasilan program KUR di Propinsi Jawa Timur, dan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan pelaksanaan penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan penyaluran KUR telah dapat direalisasi dengan baik oleh bank pelaksana KUR dengan tingginya angka penyaluran KUR di Propinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh faktor sosialisasi dan koordinasi yang baik, sehingga masyarakat banyak mendapat informasi yang jelas tentang program KUR.

Secara internal terdapat beberapa hal yang cukup menjadi kendala internal dalam proses penyaluran KUR diantaranya adalah kurangnya tenaga AO yang menangani KUR, jangkauan pelayanan dan pemahaman AO tentang KUR pada tingkat bank pelaksana. Temuan lapangan beberapa faktor eksternal yang banyak ditemui oleh bank pelaksana KUR antara lain adalah adanya persepsi yang kurang tepat tentang KUR, misalnya yang berkaitan dengan ketentuan agunan, persyaratan administrasi dan sumber dana KUR, serta adanya permintaan kredit serta program kredit lain dari pemerintah yang menggunakan subsidi bunga.

Dalam penyaluran KUR menunjukkan terdapat beberapa faktor utama penentu keberhasilan dengan tingkatan keutamaan meliputi kesiapan dalam pemilihan calon debitur, kapasitas dinas teknis dalam peningkatan akses informasi kepada pelaku usaha mikro dan kecil, kebijakan dan sumberdaya perbankan yang memberikan berbagai kemudahan dalam penyaluran KUR dan faktor makro ekonomi yang perlu dikontrol oleh Bank Indonesia.

## Saran

Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan, antara lain: perlu peningkatan koordinasi antara bank pelaksana KUR dengan dinas-dinas terkait yang terlibat dalam penandatanganan MOU untuk mensukseskan program KUR dengan menggunakan indikator beban tugas/kerja untuk masing-masing lembaga yang terlibat (fungsi identifikasi, fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan untuk UKM).

Terdapat *bottleneck* pada alur proses administrasi kredit pada perbankan, baik ditingkatkan administrasi, analisis dan keputusan kredit. Kondisi tersebut menghambat proses percepatan penyaluran KUR, maka seyogyanya bermitra dengan dinas teknis untuk dapat mengambilalih dengan melatih calon usaha mikro dan kecil bagaimana mengakses kredit dan administrasi pengajuan kredit perbankan (*capacity building* UKM).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. 2010. *Promoting Effective Poverty Alleviation and Rural Development in Indonesia through Micro and Macro Policies: A Sociological Perspective*. A Paper Submitted to The First International Conference on International Relations and Development at Thammasat University Bangkok Thailand.
- Bowen, M., Morara, M., & Mureithi, S. 2009. Management of Business Challenges among Small and Micro Enterprises in Nairobi-Kenya. *Journal of Business Management*, 2(1): 16-31.
- Fatoki, O.O. & Smit, A.V.A. 2011. Constraint to Credit Access by New SMEs in South Africa: A Supply Side Analysis. *African Journal of Business Management*, 5(4): 1413-1425.
- Muna, N. 1988. *Lembaga Kredit Pedesaan*. Lembaga Pengembangan Perbankan. Jakarta.
- Retnadi, D. 2008. Kredit Usaha Rakyat: Harapan dan Tantangan. *Economic Review*, 212 (Juni).
- Setyobudi, A. 2007. Peran Serta Bank Indonesia dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, 5(2): 29-35.
- Soemardjan. 1988. *Lembaga Kredit Pedesaan*. Lembaga Pengembangan Perbankan Jakarta.
- Suryahadi, A., Yumna, A., Raya, U.R., & Marbun, D. 2010. Review of Government's Poverty Reduction Strategies, Policies and Program's In Indonesia - ADB. *Research Report*. Lembaga Penelitian Smeru Research Institute. Jakarta.
- Susilo, Y.S. 2010. Peran Perbankan dalam Pembiayaan UMKM di Propinsi DIY. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(3): 467-478.
- Sutopo, W. 2005. Hubungan antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan. *Manajemen Usahawan Indonesia*, No.01/XXX/ Januari: 3-12.
- Syarif, T. 2011. *Prospek dan Kendala KUR dalam Mendukung Perkuatan Permodalan UMKM*. Edisi 10 Januari. <http://www.smeccda.com>. (Diakses tanggal 23 September 2011).
- Zhao, H., Wu, W., & Chen, X. 2006. What Factors Affect Small and Medium-sized Enterprise's Ability to Borrow from Bank: Evidence from Chengdu City. *Working Papers of the Business Institute Berlin at the Berlin School of Economics*. Badensche Str. 50-51, D-10825.